

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Dalam mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam UUD 1945, sebuah pembangunan sangatlah penting untuk mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan nasional dapat dimulai dari desa, karena desa merupakan tempat bermukimnya sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini berpengaruh cukup signifikan untuk menciptakan stabilitas nasional, sehingga dalam pembangunan nasional, desa memiliki peranan yang penting (Agunggunanto, Arianti, & Kushartono, 2016). Semua hal yang berhubungan dengan mengidentifikasi masalah dalam masyarakat kemudian merencanakan dan merealisasikan tujuan nasional terjadi di tingkat desa, sehingga posisi desa dikatakan strategis dalam pembangunan nasional (Sidik, 2015). Ketika desa sudah dijadikan sarana pembangunan sehingga dapat mengurangi kesenjangan merupakan pengertian dari pembangunan pedesaan.

Desa diberikan sebuah wewenang oleh pemerintah pusat dalam mengatur anggaran melalui lembaga ekonomi yang dimiliki di tingkat desa (Budiono, 2015). Salah satu lembaga ekonomi tingkat desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan serta potensi yang dimiliki desa. Yang menjadi dasar dalam

pembentukan BUMDes adalah kebutuhan dan potensi yang dimiliki, hal ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa BUMDes merupakan suatu badan usaha dimana sebagian besar modalnya dimiliki oleh melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola asset, jasa pelayanan, serta usaha lain untuk mensejahterakan masyarakat desa. Pendirian BUMDes dimaksud untuk mewadahi segala kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk lembaga yang dikelola secara mandiri, professional, efektif serta efisien. BUMDes didirikan untuk membangun perekonomian di pedesaan sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Agunggunanto et al., 2016). Sebagai suatu badan usaha yang memihak kepada kepentingan masyarakat, BUMDes menjalankan kegiatan usahanya dengan berupaya memberikan pelayanan sosial dan ekonomi yang berorientasi pada *profit oriented* namun juga *social benefit*. Cara yang dilakukan dalam hal ini yaitu memanfaatkan potensi di desa seperti sumber daya alam dan ekonomi. Namun potensi usaha tidak harus terfokus kepada sumber daya alam yang dimiliki karena tidak semua desa wilayahnya didukung oleh kekayaan alam. Hasil yang diperoleh dari BUMDes nantinya dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat, pembangunan desa, serta pengembangan usaha.

Ciri-ciri BUMDes berdasarkan (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007) yang membedakannya dengan lembaga komersial lainnya adalah (1) badan usaha dikelola secara Bersama-sama dan milik desa; (2) sebesar 51% modal bersumber dari anggaran desa dan sisanya bersumber dari masyarakat sebesar 49%; (3) operasional dilaksanakan menurut filsafah bisnis yang mengacu

pada budaya lokal; (4) dasar yang dijadikan untuk melanjutkan bidang usaha adalah informasi pasar dan juga potensi yang dimiliki desa; (5) berdasarkan peraturan yang telah disusun, laba yang diperoleh BUMDes digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat; (6) fasilitas yang digunakan ditunjang oleh pemerintah provinsi, kabupaten serta desa; dan (7) pelaksanaan operasional BUMDes diawasi secara langsung oleh pemerintah desa bersama dengan BPD dan anggota.

BUMDes yang sudah berdiri harus terus dikembangkan agar dapat berfungsi sesuai peranannya. Apabila BUMDes dikelola secara terarah dan profesional maka tujuan dan sasaran dari BUMDes itu sendiri dapat tercapai. BUMDes diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian desa, sehingga BUMDes menjadi solusi dari beberapa permasalahan yang terjadi di desa (Ramadana, Ribawanto, & Suwondo., 2013). Beberapa desa ingin mendirikan BUMDes, namun terdapat permasalahan dari segi kelembagaan, pemodalan serta sumber daya (Agunggunanto et al., 2016). Masalah utama dalam mendirikan atau operasional BUMDes adalah sisi kelembagaan. Permasalahan kelembagaan internal antara lain system kepercayaan, pengelolaan dan transparansi keuangan (Farokhah & Sapoetra, 2018).

Permasalahan pengolahan, sistem kepercayaan, dan transparansi keuangan dapat menimbulkan adanya tindakan kecurangan. Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2001) Tindakan kecurangan adalah suatu kesalahan yang ditimbulkan akibat perlakuan yang kurang wajar terhadap aktiva (yang dikatakan sebagai penyelewengan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang mengakibatkan penyajian laporan keuangan tidak sesuai. Berdasarkan *Association*

of *Certified Fraud Examinations*, tindakan *fraud* dapat berupa penyelewengan aset (Soepardi, 2010). Penyalahgunaan aset dapat dikatakan sebagai kecurangan kas serta kecurangan terhadap persediaan dan juga asset lainnya. Adapun bentuk-bentuk Tindakan kecurangan menurut *Statement on Auditing Standards* No. 99 tentang *Consideration of Fraud* yaitu memanipulasi, memalsukan, merubah catatan akuntansi serta dokumen pendukung lainnya dari laporan keuangan. Hal ini memberikan penegasan bahwa kasus penyimpangan pengelolaan keuangan dana BUMDes Desa Patas adalah bentuk tindakan kecurangan.

Berdasarkan teori *Fraud Triangle* terdapat tiga alasan yang mendorong seseorang melakukan tindakan *fraud* antara lain *pressure* (dorongan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (rasionalisasi) (Karyono, 2013). *Pressure* adalah dorongan yang dimiliki individu untuk melakukan kecurangan, contohnya gaya hidup mewah dan hutang yang dimiliki. *Opportunity* merupakan kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan kecurangan yang disebabkan oleh lemahnya *internal control* yang dimiliki oleh suatu organisasi, kurangnya pengawasan, atau penyalahgunaan wewenang. *Rationalization* merupakan sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang memperbolehkan pegawai melakukan tindakan kecurangan. Rasionalisasi merupakan elemen yang selalu ada dalam *fraud*, karena setiap pelaku akan mencari pembenaran atas tindakannya.

Menurut (Tuanakotta, 2007), kecurangan disebabkan karena adanya sebuah tekanan yang berasal dari dalam individu itu sendiri. Senada dengan itu, (Albrecht, 2012) menyatakan bahwa tingginya tekanan yang dimiliki seseorang menyebabkan kemungkinan perilaku kecurangan yang terjadi semakin tinggi. (Salam, 2005) memaparkan bahwa tekanan adalah sesuatu hal yang mendorong

seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan karena tuntutan gaya hidup yang mewah, ketidakberdayaan perilaku *gambling* dalam permasalahan keuangan, ketidakpuasan dalam bekerja serta keinginan untuk mengalahkan sistem. Pendapat-pendapat yang telah disampaikan menunjukkan bahwa tekana memberikan pengaruh positif terhadap terjadinya tingginya kecurangan. Semakin tinggi tekanan berbanding lurus dengan semakin tingginya kecurangan.

Menurut (Tuanakotta, 2007), kecurangan disebabkan karena adanya peluang (*opportunity*). *Opportunity* merupakan kombinasi antara situasi dan kondisi seseorang yang memungkinkan orang tersebut melakukan tindakan kecurangan dan tidak terdeteksi. Kemungkinan perilaku kecurangan akan semakin besar apabila *opportunity* meningkat (Albrecht, 2012). Menurut (Tjahjono, 2013), peluang akan ada apabila seseorang memiliki pengetahuan mendalam mengenai kelemahan organisasi dan sistem yang ada sehingga memudahkannya melakukan *fraud*. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa peluang memberikan pengaruh positif terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan. Semakin tinggi peluang berbanding lurus terhadap tindakan kecurangan yang semakin tinggi.

Menurut (Tuanakotta, 2007), kecurangan disebabkan karena adanya rasionalisasi (*rationalization*). Menurut (Stice, Earl, & Skousen, 2009), rasionalisasi merupakan elemen yang penting dalam kecurangan, rasionalisasi menyebabkan pelaku kecurangan mencari pembenaran atas perbuatannya. Senada dengan itu, (Albrecht, 2012) berpendapat bahwa *rationalization* merupakan suatu alasan atau pembenaran diri sendiri yang dibuat oleh pelaku kecurangan untuk membenarkan perilakunya. Rasionalisasi sering terjadi akibat pelaku kecurangan

merasa bahwa dirinya tidak melakukan suatu kesalahan dan sudah melakukan suatu hal yang sewajarnya.

Selanjutnya Marks mengembangkan teori *fraud triangle* menjadi *fraud pentagon* dengan menambahkan arogansi (*arrogance*) dan kompetensi (*competence*) ke dalam teori *fraud triangle* (Karyono, 2013). Arogansi merupakan sikap angkuh dan sombong yang dimiliki oleh seseorang yang percaya bahwa ia dapat bertindak curang tanpa diketahui oleh orang lain. Sifat seperti ini akan ada ketika besarnya sifat mementingkan diri sendiri dari manajemen. Sedangkan, kompetensi disini merupakan hal yang ada kaitannya dengan *fraud*. Kompetensi merupakan suatu keahlian yang dimiliki seseorang yang dapat menembus pengadilan internal yang ada di lembaga atau organisasi, dapat mengembangkan strategi yang canggih dalam penggelapan serta mampu menganalisis situasi sosial serta mempengaruhi orang lain agar bekerjasama dengannya sehingga mampu mendapatkan keuntungan untuknya.

Terdapat hasil penelitian terdahulu terkait dengan faktor apa saja yang memberikan pengaruh terhadap tindakan kecurangan pengelolaan anggaran. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari, (2017), yang menunjukkan bahwa *opportunity, pressure, rationalization*, dan perilaku tidak etis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tjahjono, (2013), Karyono (2013), Aprilia, (2017), Salam, (2005), yang menjelaskan pengaruh dari *opportunity, pressure, rationalization*, terhadap tindakan kecurangan yang terjadi . Hasil penelitian lainnya dilakukan oleh Dewi, (2019), yang menunjukkan *greed, opportunity, pressure* memiliki hubungan yang positif terhadap kecurangan

laporan keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tuanakotta, (2007), kecurangan disebabkan karena adanya tekanan (*pressure*). Penelitian ini juga diperkuat oleh Albrecht, (2012) yang menyatakan bahwa semakin tingginya *pressure*, maka semakin besar pula kemungkinan perilaku kecurangan akan terjadi. Penelitian lain dilakukan oleh Yudistira, (2017) yang menemukan bahwa aspek tekanan merupakan variabel paling dominan berpengaruh terhadap fraud. Sedangkan Agustina dan Pratomo (2019), menyatakan bahwa variabel tekanan merupakan variabel paling dominan berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

Situasi BUMDes di Kecamatan Gerokgak saat ini mengalami kondisi yang kurang sehat dalam pengelolaan keuangannya. Salah satunya terjadi pada Desa Patas, dimana ada permasalahan yang muncul pada BUMDes, yaitu kurang transparansinya pengelolaan keuangan hingga terjadi tindak kecurangan yang dilakukan pengurus BUMDes itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan kekeliruan dalam mengelola dana BUMDes sebesar Rp. 1,2 miliar (Sutiawan, 2019). Pengurus BUMDes juga memfiktifkan laporan pertanggung jawaban (LPJ). Terbukti bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Buleleng bersama Tim Money Provinsi Bali, Unit Tipikor Kepolisian dan Kejaksaan mengadili dengan meminta keterangan kepada para pengurus terkait dugaan penyelewengan tersebut di GOR Amarta Yudha desa setempat. Adanya kasus penyimpangan pengelolaan keuangan dana BUMDes menunjukkan adanya tindakan kecurangan yang dilakukan pengurus. Melihat fakta tersebut penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan pada pengurus BUMDes. Berdasarkan hal tersebut, maka

pengambilan judul yang akan dikembangkan dalam penelitian ini, yaitu “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tindakan Kecurangan Pengelolaan Anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Gerokgak”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, diperoleh beberapa permasalahan sebagai berikut.

- 1) Adanya permasalahan yang muncul dari segi kelembagaan BUMDes, yaitu pengelolaan sistem kepercayaan, dan transparansi keuangan.
- 2) Adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh BUMDes Desa Patas, yang telah menyimpan pengelolaan keuangan BUMDes sebesar 1,2 miliar. Pengurus BUMDes juga telah memfiktifkan laporan pertanggung jawaban (LPJ).
- 3) Adanya beberapa faktor yang dapat mendorong terjadinya tindakan kecurangan yang masih perlu dilakukan pengujian dalam penelitian ini.

1.3 Pembatasan Masalah

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini dibatasi pada yang berkaitan dengan faktor apa saja yang mempengaruhi tindakan kecurangan pengelolaan anggaran BUMDes di Kecamatan Gerokgak.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut.

- 1) Faktor apa saja yang mempengaruhi tindakan kecurangan pengelolaan anggaran BUMDes di Kecamatan Gerokgak?
- 2) Faktor mana yang paling dominan mempengaruhi tindakan kecurangan pengelolaan anggaran BUMDes di Kecamatan Gerokgak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut.

- 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kecurangan pengelolaan anggaran BUMDes di Kecamatan Gerokgak.
- 2) Faktor yang paling dominan mempengaruhi tindakan kecurangan pengelolaan anggaran BUMDes di Kecamatan Gerokgak.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu ekonomi pada bidang akuntansi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kecurangan pengelolaan anggaran. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan ke depannya dapat diwujudkan cara untuk pencegahan terjadinya tindakan kecurangan pengelolaan anggaran.

1.6.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat mengembangkan memberikan pemahaman serta pengetahuan tentang manfaat pengungkapan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kecurangan dalam pengelolaan anggaran.

2) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan perbendaharaan perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, serta pengetahuan bagi pembaca tentang peran penting pengungkapan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kecurangan dalam pengelolaan anggaran.

3) Bagi BUMDes

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan secara teoritis dan pemahaman mengenai peran penting pengungkapan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kecurangan, sehingga dapat dikembangkan cara pencegahan tindakan kecurangan.

